

Politik Elit Nahdlatul Ulama dalam Pemilu Legislatif di Kota Makassar Tahun 2014 dan 2019

Nurlira Goncing¹, Muh. Abdi Goncing²
Universitas Hasanuddin¹
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar²
e-mail: lhyra_dls@yahoo.com

Abstrak

Nahdlatul Ulama merupakan salah satu organisasi kemasyarakatan terbesar di Indonesia. Kehadirannya telah mewarnai perjalanan Indonesia, baik sebagai sebuah bangsa maupun sebagai sebuah negara, termasuk urusan perpolitikan di negeri ini. Dalam konteks lokal, khususnya di kota Makassar, perannya juga terlihat, khususnya yang dilakukan oleh para tokoh ataupun elit yang berafiliasi ke organisasi keagamaan ini. Tulisan ini bermaksud melihat aktivitas politik para tokoh dan elit yang berafiliasi ke Nahdlatul Ulama, khususnya dalam kontestasi pemilihan anggota legislatif pada tahun 2014 dan 2019.

Kata Kunci :

Politik Elit, Nahdlatul Ulama, Pemilu Legislatif

PENDAHULUAN

Organisasi kemasyarakatan (ormas) merupakan salah satu wadah utama dalam sejarah perjuangan dan pergerakan kemerdekaan Negara Republik Indonesia, di antaranya ialah Boedi Oetomo, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan ormas lain yang didirikan sebelum kemerdekaan Republik Indonesia (Noer, 1996; Feillard, 1999). Peran dan rekam jejak ormas yang telah berjuang secara ikhlas dan sukarela tersebut mengandung nilai sejarah dan merupakan aset bangsa yang sangat penting bagi perjalanan Bangsa dan Negara. Hal ini dikarenakan, secara tidak langsung, organisasi-organisasi kemasyarakatan tersebut merupakan *fund-ing fathers* berdirinya negara ini.

Dalam konteks nasional, NU merupakan salah satu dari organisasi yang menjadi pendiri negara ini. Secara moral dan politik, tentu memiliki kepentingan untuk terus mengupayakan agar cita-cita awal berdirinya negara ini dapat terus dipertahankan. Salah satu upaya tersebut adalah dengan mendidik warganya menjadi negarawan yang mencitai tanah airnya sepenuh hati. Inilah yang kemudian menjadi suatu *adigium* di NU, yang awalnya difatwakan oleh salah seorang tokoh pendirinya, KH. Wahab Chasbullah, *hubbul wathan minal iman* (cinta tanah air bagian dari keimanan) (Sapriillah, 2020).

Dalam konteks lokal di Sulawesi Selatan, kehadiran NU pada dasarnya membawa

kepentingan politik pada tahun 1953 (Sapriillah, 2015). Peran politik yang dijalankan NU bukanlah politik praktis melainkan politik kebangsaan, politik dalam ranah etis, moral dan norma (Sartono, 2022). Sejarah NU menunjukkan bahwa NU selalu berkelindan dengan politik. Kini NU telah terseret ke arus politik praktis, dukung-mendukung, yang pada akhirnya justru mendelegitimasi organisasi Islam terbesar di Indonesia itu (Ulama, 2021).

Kehadiran NU di Sulawesi Selatan juga dapat ditelusuri dalam beberapa fase berbeda, baik secara kultural maupun organisasional sesuai dengan tokoh, ajaran yang dibawa, dan pengaruhnya di berbagai daerah (Arfah, 2015). Sekitar abad ke-17 atau 18, seorang Mursyid bernama Syaikh Yusuf yang juga salah seorang murid Datuk ri Bandang membawa dan menyebarkan NU di Nusantara termasuk Sulawesi.

Pada pemilihan Presiden tahun 2009, NU berkesempatan untuk ikut menjadi penentu kepemimpinan Nasional. NU di sini kemudian memainkan peran strategisnya, khususnya dalam politik para elitnya. Namun ada beberapa hal yang mesti dijadikan catatan terlebih dahulu, bahwa NU mesti menjaga independensinya, mempertajam visi dan pengabdianya di bidang sosial dan keagamaan, serta meningkatkan sumber daya jamaah dan jam'iyahnya.

Pada pemilihan anggota legislatif tahun 2014 lalu, masyarakat Kota Makassar telah menentukan pilihan mereka masing-masing. Menariknya, dalam pemilihan ini terdapat beberapa tokoh dan elit yang berafiliasi ke

Nahdlatul Ulama (NU) yang ikut serta meramaikan proses pemilihan tersebut, baik sebagai calon anggota legislatif, tim sukses, maupun sebagai simpatisan pendukung para calon. Kondisi tersebut kemudian menimbulkan polemik di internal jama'ah dan jam'iah NU. Polemik ini disebabkan oleh beberapa calon anggota DPRD yang berafiliasi NU berada dalam satu daerah pilihan (Dapil). Suasana seperti inilah yang kemudian menghasilkan perpecahan suara warga NU.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk membahas tema terkait aktivitas politik elit NU, khususnya dalam kontes-tasi pemilihan anggota legislatif pada tahun 2014 dan 2019. Hal ini dikarenakan, secara ideal, NU adalah organisasi kemasyarakatan yang tidak melakukan aktivitas politik praktis berdasarkan Khittah NU 1984, bahwa "Pancasila sebagai asas organisasi dan Negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 ini sebagai perjuangan final" (Ulama, 2010). Putusan Khittah NU ini kemudian menjadikan NU memfokuskan gerakannya dalam bidang-bidang pemberdayaan masyarakat.

TINJAUAN PUSTAKA

Dinamika dalam tubuh NU, khususnya yang terjadi pada para tokohnya, telah merambah pada berbagai aspek. Salah satu aspek tersebut adalah politik (Muhammad, 2015). Hal ini merupakan sesuatu yang lumrah terjadi, khususnya dalam konteks dunia modern yang serba terbuka seperti saat ini. Apalagi NU pada hakikatnya adalah manifestasi modern dari kehidupan

keagamaan, politik dan budaya para kiai yang menjadi tokoh sentralnya.

NU dan para kiai sebagai tokoh sentralnya merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Para kiai inilah kemudian, yang secara umum, disebut sebagai elite NU. Namun, Hairus Salim dan M. Ridwan mengungkapkan bahwa terdapat beberapa tokoh muda NU, yang sebelumnya eksis di jalur kultural, kemudian memilih jalur politik (Salim & Ridwan, 1999). Para tokoh muda NU yang memilih jalur politik ini kemudian, dalam konteks kekinian, telah bertransformasi menjadi elite baru atau elite muda dalam tubuh NU.

Pengaruh para kiai dan elite baru atau elite muda dalam tubuh NU ini cukup signifikan, khususnya dalam konteks sikap dan peran politik NU atas politik praktis, seperti pilkada dan pemilu legislatif. Hal ini bisa dilihat, misalnya pada pilkada Kediri (Edwinarta & Dwijayanti, 2016), pada Pemilu 2009 di Glenmore Kabupaten Banyuwangi (Sadi, 2016), pada Pilkadaka di Kabupaten Sumenep Tahun 2010 (Faizin, 2017), atau pada Pilkada Serentak Tahun 2015 di Kabupaten Luwu Utara (Zainal, Zainal, & Syam, 2019). Keseluruhan hal ini menunjukkan bahwa relasi kuasa maupun politik patronal dalam tubuh NU memiliki pengaruh yang cukup besar dalam setiap gerakannya, termasuk gerakan politik yang dilakukan oleh para tokoh yang masuk dalam kategori elite dalam tubuh NU.

TINJAUAN TEORETIS

Artikel ini menggunakan dua landasan teoritis yakni teori elite politik dan teori pemilu. Teori elite politik lebih spesifik menggunakan teori Karl Marx, sedangkan teori pemilu lebih spesifik menggunakan teori Ramlan Surbakti. Teori pertama digunakan untuk melihat sejauh mana posisi atau peran, reputasi serta pengaruh elite Nahdlatul Ulama dalam masyarakat. Teori kedua digunakan untuk melihat bagaimana Pemilu sebagai instrumen demokrasi dijadikan oleh elite Nahdlatul Ulama dalam mendorong partisipasi politik warganya, khususnya dalam kontestasi pemilihan anggota legislatif pada tahun 2014 dan 2019 di Kota Makassar.

Karl Marx mengungkapkan bahwa dalam hal elite politik terdapat tiga metode, yang hanya dapat dirubah melalui revolusi. *Pertama*, metode posisi. Elite politik dalam metode ini adalah yang menduduki posisi atau jabatan strategis dalam sistem politik. Jabatan strategis yaitu yang dapat membuat dan mengambil keputusan serta kebijakan atas nama Negara. Elite ini mencakup para pemegang jabatan tinggi dalam pemerintahan, partai politik, dan kelompok kepentingan (Wirawan, 2012).

Kedua, metode reputasi. Elite politik di sini adalah yang memiliki reputasi dan kemampuan dalam memproses berbagai permasalahan. Permasalahan tersebut kemudian dapat dirumuskan menjadi suatu keputusan politik yang berdampak bagi orang banyak. *Ketiga*, metode pengaruh. Elite politik di sini merupakan orang-

orang yang memiliki pengaruh di berbagai level kekuasaan. Orang-orang ini juga memiliki kemampuan mengendalikan masyarakat sesuai pengaruhnya, sehingga masyarakat dapat menaatinya secara langsung dan spontan (Wirawan, 2012).

Teori pemilu oleh Ramlan Surbakti disebut sebagai “instrumen”. Instrumen berarti alat atau “fasilitas” menuju ke satu tujuan. Tujuan tersebut dibagi ke dalam tiga hal, di mana ketiga hal tersebut merupakan upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis, beradab dan membatasi kekuasaan secara berkala. Pemilihan umum merupakan suatu cara memilih wakil-wakil rakyat pada lembaga perwakilan rakyat atau legislatif, serta salah satu bentuk pelayanan dan pemenuhan atas hak asasi warga negara dalam bidang politik. Oleh karena itu, bagi suatu negara dengan pemerintahan demokratis, menjadi suatu keharusan untuk melaksanakan pemilihan umum dalam waktu-waktu yang telah ditentukan (Syahbani, Rusdiyanto, & Wihardi, 2013).

METODE PENELITIAN

Aspek-aspek yang terkait dengan metodologi penelitian, antara lain pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik analisis data, subjek penelitian dan keterbatasan penelitian. Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar. Ada dua alasan bagi penulis menetapkan Makassar sebagai lokasi penelitian; yaitu *pertama*, sebagai ibukota provinsi Sulawesi Selatan, Makassar menjadi tempat berkumpulnya para elit dari berbagai kelompok masya-

rakat, termasuk NU, yang sangat dibutuhkan penulis untuk menjadi narasumber dalam penelitian ini. *Kedua*, Kota Makassar menjadi salah satu daerah di Indonesia dengan tingkat dinamika politik yang tinggi sehingga dapat lebih mudah melihat partisipasi politik masyarakat terutama kalangan NU. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Metodologi kualitatif dipilih guna memperoleh pemahaman yang otentik dari pengalaman sebuah institusi yang berhubungan erat dengan topik penelitian, dalam hal ini adalah Politik Nahdlatul Ulama dan Pemilihan Anggota DPRD Kota Makassar Tahun 2014 dan 2019.

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang didasarkan pada deskripsi yang jelas dan detail, karena menjawab pertanyaan apa, mengapa dan bagaimana. Penyajiannya sangat kompleks, rinci dan komprehensif sesuai dengan fenomena yang terjadi pada saat penelitian (Murcitaningrum, 2013). Pendekatan kualitatif menggunakan semua pandangan filsafat yang mendasar tentunya dengan bentuk penafsiran yang sesuai dengan kepentingan fenomenologi (Bungin, 2007).

Penelitian kualitatif berusaha mengungkapkan berbagai keunikan yang terdapat dalam individu, kelompok, masyarakat, atau organisasi dalam kehidupan sehari-hari secara menyeluruh, rinci, dalam, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Penelitian kualitatif diharapkan mampu menghasilkan uraian mendalam tentang ucapan, tulisan, dan perilaku yang dapat diamati dari individu, kelompok, dan

masyarakat atau organisasi tertentu dalam konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh, komprehensif dan holistik. Karakteristik khusus penelitian kualitatif adalah berupaya mengungkapkan keunikan individu, kelompok, masyarakat, atau organisasi tertentu dalam kehidupan sehari-hari secara komprehensif.

Penggunaan metode kualitatif dalam penelitian tentang politik NU dan pemilihan anggota DPRD Kota Makassar 2014 dan 2019 yang sulit dan mungkin tidak dapat diukur dengan angka – angka tetapi juga karena Nahdlatul Ulama mempunyai penelitian yang bersifat kualitatif. Penilaian kualitatif ini menyangkut persepsi, pendapat, gambaran, pemahaman, pengetahuan seseorang terhadap suatu objek dan nilai yang sangat tergantung pada jawaban yang membutuhkan penjelasan mendalam berdasarkan apa yang diketahuinya. Bukan berarti bahwa penelitian ini tidak dapat menggunakan data-data kuantitatif, melainkan sebelum merancang sebuah keputusan setiap orang tentunya dituntut untuk mendalami setiap aspek secara mendalam dan menyeluruh. Penelitian kualitatif berusaha menemukan teori-teori substantif atau formal yang semuanya jelas berasal dari data.

Politik NU dan pemilihan anggota DPRD Kota Makassar 2014 dan 2019 cukup menarik dikaji karena dalam pemilihan tersebut NU masih terlibat dalam ranah politik praktis meskipun NU telah kembali ke Khittah. Pada periode sebelumnya NU tidak mendapatkan kursi pada tahun 2009 melalui partai besarnya yakni PKB (Partai

Kebangkitan Bangsa). Namun NU sedikit terwakilkan oleh beberapa kadernya melalui partai lain seperti Hanura, PKS, PPP, dan Golkar. NU tetap optimis untuk ikut pada pemilihan anggota DPRD selanjutnya yakni di tahun 2014, dan yang terjadi adalah NU lagi-lagi tidak mendapatkan kursi di PKB tetapi terwakilkan oleh beberapa kadernya dari PPP, Hanura, Demokrat, dan Golkar.

Untuk mendapatkan informasi dan data yang menyangkut masalah penelitian ini, maka penulis melakukan penelitian pada peran struktur NU seperti kader NU, pengurus, staf dan anggota NU dalam pemilihan anggota DPRD Makassar tahun 2014 dan 2019.

PEMBAHASAN

NU dan Politik Kebangsaan

NU sebagai jam'iyah sekaligus gerakan *diniyah islamiyah* dan *ijtimā'iyah* (keagamaan dan sosial kemasyarakatan), telah ada jauh sebelum Negara ini merdeka (Nahdlatul Ulama, 2021). Ajaran Aswaja masuk ke wilayah Nusantara sejak abad ke-7 M, dan berkembang abad ke 13 melalui dakwah para Walisongo. Termasuk Islam di Sulawesi Selatan pada abad itu didakwahkan oleh ulama Aswaja, Sayyid Jamaluddin al-Akbar di Tosora, wilayah Bugis Wajo, dan Tiga Datuk Aswaja di Wilayah Makassar pada abad 16 (Saprillah, 2020).

NU yang dibawa oleh Wahid Hasyim ini mula-mula di kembangkan pertama kali di

wilayah Pulau Salemo (Pangkep) Provinsi Sulawesi Selatan. Kemudian meluas ke seluruh daerah di Sulawesi termasuk Makassar. Untuk kota Makassar, sangat besar dan jelas peranan Gurutta Ahmad Kali Bone dalam membawa dan mengembangkan NU di kota Makassar ini. Beliau adalah salah seorang pendiri dari Masjid Raya yang ada di Kota Makassar (Sapriillah, 2020).

Pada tahun 1930, KH Ahmad Kali Bone bersama Andi Mappanyukki dan ulama sejawatnya, pertama kali membentuk organisasi Rabitatul Ulama (RU). Organisasi ini sejalan dengan paham NU. Kemudian atas prakarsa kedua ulama tersebut bersama KH. Muhammad Ramli, KH Sayyid Jamaluddin Assegaf Puang Ramma, KH Saifuddin, Mansyur Daeng Limpo dan beberapa ulama selainnya, menjadikan RU sebagai NU pada tanggal 8 April 1950, atas restu KH. Wahid Hasyim yang saat itu sebagai Ketua PBNU (Suyuti, 2016). Puang Ramma sebagai wakil Ketua NU di zaman itu, memusatkan dakwah di Kabupaten Gowa dan Makassar (Sapriillah, 2020).

Puang Ramma sejak tahun 1961 sebagai Qadhi Gowa, yang sebelumnya yakni 1956-1959 bersama KH. Muh Ramli mewakili NU sebagai Dewan Konstituante di Bandung. Saat menjalankan tugasnya sebagai anggota dewan, KH. Muh Ramli wafat pada 3 Februari 1958 di Bandung, dan dimakamkan di Pemakaman Arab, Bontoala, Makassar. Sepeninggal ulama NU ini, Puang Ramma tetap di dewan dan

menjalankan tugas sampai akhir periode. Selanjutnya Puang Ramma mewakili NU di DPRD Sulawesi Selatan. Sejak Mukhtar NU ke-27 Situbondo yang menetapkan bahwa NU kembali ke khittah 1926, Puang Ramma tidak lagi menjadi anggota dewan, namun tetap berkonsentrasi pada pengkhidmatan NU sampai akhirnya Puang Ramma dipercaya menjadi Wakil Ketua NU Sulsel tahun 1977-1982 dan menjabat sebagai Mustasyar PWNU Sulawesi Selatan sampai akhir hayatnya. Memasuki tahun 1982, AGH Sanusi Baco sebagai Rois Syuriah NU Sulawesi Selatan, lebih aktif mengembangkan sayap NU di daerah ini, di dampingi Ketua Tanfidziyah, KH Abdurrahman B (1982-1987), KH Abd Rahman K (1987-2002), H Harifuddin Cawidu (2002-2005), KH Zein Irwanto (2006-2013) dan Prof. Dr. H. Iskandar Idy (2013-2019) (Sapriillah, 2020).

NU cabang Makassar sendiri secara resmi baru terbentuk pada 21 Februari 1953, dengan pengurus HM. Shaifuddin dan HM. Amin Nasir sebagai ketua dan wakil ketua, HM. Danial sebagai sekretaris dan H. Abdullah Yusuf sebagai bendahara. Setelah Makassar, menyusul Cabang Parepare terbentuk pada November 1955, kemudian Kabupaten Bone, Polmas, Bantaeng, Poso dan Luwu. Kehadiran NU di Kota Makassar dipelopori oleh; Abdul Hamid Dg Magassing, H. Gulam Gaus, Abdul Rauf Dg. Rangka, Abd. Muin Dg. Miyala, H. Abd Rasyid Dg Lompo, Ahmad Al Banjar, Abdurrahman Dg. Situju di bawah koordinasi H.A. Husen

Saleh Assegaf sebagai perwakilan NU di Makassar (Sapriillah, 2020).

Hubungan NU dengan politik praktis menjadi isu menarik. Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat membuka Muktamar ke-32 NU di Makassar, menurutnya NU memiliki budaya dan tradisi yang mulia untuk tidak mudah tergoda dan larut dalam politik praktis. Politik NU adalah politik yang berada pada tatanan nilai-nilai luhur, yakni mengedepankan sejarah (Ulama, 2021). Saat itu SBY berharap agar Muktamar tersebut dapat meneguhkan khittah NU sebagai organisasi pendidikan, dakwah, dan sosial kemasyarakatan yang berhaluan *Ahlu Sunnah Wal Jamaah*. Menurutnya, kaum *nahdliyin* di jajaran legislatif tidak hanya berada dalam satu partai politik, tetapi tersebar hampir di seluruh partai politik di Tanah Air. Hal itu merupakan warna kemajemukan dari kiprah NU dan dapat terus meningkatkan khidmat dalam politik keumatan dan politik kebangsaan.

Hubungan NU dengan politik praktis agaknya merupakan isu yang tak pernah selesai dibicarakan di kalangan NU, apalagi NU memiliki sejarah sempat menjadi partai politik pada tahun 1955. Isu itu menjadi marak diperbincangkan pasca reformasi ketika partai politik (parpol) berjumlah cukup banyak, bahkan dalam 4-5 kali muktamar yang terakhir sempat muncul indikasi "ketertarikan" parpol dalam pertarungan kandidat ketua umum PBNU. Tarik menarik antara NU dengan politik praktis yang disinggung dalam

Muktamar ke-32 NU di Makassar. Misalnya, PWNU Jawa Timur menginginkan PBNU mengarahkan pilihan politik warga NU supaya potensi politik NU tidak dimanfaatkan orang lain. Arahan itu tidak menyalahi Khittah NU, karena NU tetap tidak akan berpolitik, tapi NU hanya menyelamatkan potensi politik warga NU agar tidak dimanfaatkan orang lain. Oleh karena itu, PWNU Jawa Timur mengusulkan realisasi Komisi Politik atau "Komisi *Maslahah Ammah*" dalam Muktamar 2010 di Makassar (Sapriillah, 2020).

NU dan Pemilu

Kiprah NU dalam pemilu dimulai setelah NU keluar dari Masyumi dan menyatakan dirinya sebagai partai politik baru yang berdiri tahun 1952. Pemilu 1955 dinilai para pengamat sebagai pemilu paling demokratis di Indonesia. Pada tahun itu, NU menjadi partai besar dengan mendapat 18,4% total suara dan mendapat 45 kursi di DPR.

Tabel 1.

Perolehan Suara Pemilu Legislatif Kota Makassar Tahun 2014

No.	Partai	Suara
1.	Nasdem	59.313 (9,74%)
2.	PKB	19.051 (3,13%)
3.	PKS	44.534 (7,31%)
4.	PDIP	49.616 (8,15%)
5.	Golkar	85.909 (14,11%)
6.	Gerindra	72.238 (11,87%)
7.	Demokrat	86.612 (14,23%)

8.	PAN	47.745 (7,84%)
9.	PPP	53.256 (8,75%)
10.	Hanura	45,509 (7,47%)
11.	PBB	20.811 (3,42%)
12	PKPI	24.231 (3,98%)

Sumber: tribunnews.com, 2014.

Berdasarkan data di atas, seperti yang telah dijelaskan peneliti bahwa dua partai yang memiliki kedekatan kultural dengan NU yakni PKB dan PPP belum mampu menarik hati masyarakat. PPP mampu menembus 5 besar perolehan suara di Kota Makassar. Namun berbeda jauh dengan perolehan suara PKB, justru yang paling kecil hanya mendapat 3, 13 % suara di Kota Makassar. Meski Kota Makassar adalah lumbung suara Golkar, sejak tahun 2004 hingga tahun 2014 selalu ada perwakilan NU yang terpilih sebagai anggota DPRD Kota Makassar. Hal ini tentu menunjukkan eksistensi kader NU di Kota Makassar.

Tabel 2.

Anggota Legislatif Kota Makassar Tahun 2014 yang berafiliasi ke NU

No.	Nama	Partai
1.	M. Yunus HJ	Hanura
2.	Busranuddin	PPP
3.	Abdul Aziz Namu	PPP
4.	Abdul Wahid	PPP
5.	Sampara Sarip	PPP
6.	Fasruddin Rusli	PPP

7.	Abdi Asmara	Demokrat
8.	Mustafa Alwi	Gerindra
9.	A. Nurman M	Golkar

Sumber: Usman Sofyan, Sekretaris PCNU Kota Makassar, 2022.

Kader-kader NU yang terpilih sebagai anggota legislatif di Kota Makassar, meski kendaraan partai berbeda tetapi nantinya akan memperjuangkan kepentingan dan dakwah NU di parlemen. Keberadaan dan keberhasilan kader NU memenangkan pemilihan anggota DPRD Makassar 2014 melalui jalur partai yang bukan PKB atau PPP, justru menjadi keuntungan bagi NU secara institusional karena memiliki tiang-tiang kader dari berbagai partai yang tidak bercorak NU. Berikut daftar anggota legislatif dari hasil pemilihan anggota DPRD tahun 2019 di Kota Makassar:

Tabel 3.

Anggota Legislatif Kota Makassar Tahun 2019 yang Berafiliasi ke NU

No.	Nama	Partai
1	Fasruddin Rusli	PPP
2	M Yunus	Hanura
3	Abdi Asmara	Demokrat
4	Abdul Wahid	PPP
5	Abdul Aziz Namu	PPP
6	Imam Muzakkar	PKB

Sumber: rri.co.id, 2019.

Dari 50 anggota legislatif yang telah ditetapkan sebagai anggota DPRD Kota Makassar periode 2019-2024, terdapat bebe-

rapa tokoh yang berafiliasi ke NU, di antaranya: Fasruddin Rusli (PPP), M Yunus (Hanura), Abdi Asmara (Demokrat), Abdul Wahid (PPP), Abdul Aziz Namu (PPP), Imam Muzakkar (PKB) (Sofyan, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa politik elit dan tokoh Nahdlatul Ulama mampu menjaga eksistensinya di tengah arus pergolakan politik tanah air. Selain itu, perlu dijadikan catatan, bahwa perolehan suara dalam Pemilu Legislatif pada tahun 2019 ini mengalami sedikit perubahan dibanding Pemilu Legislatif tahun 2014 dan 2009, di mana PKB yang didirikan oleh elit NU akhirnya mampu mendudukkan 1 wakilnya, meski hanya memiliki 1 kursi, yakni Imam Muzakkar.

KESIMPULAN

Politik elit yang dilakukan oleh para tokoh dan elit politik yang berafiliasi ke NU, khususnya dalam konteks pemilihan anggota DPRD tahun 2014 dan 2019, menunjukkan bahwa suara warga NU, baik yang berada di struktural maupun di luar struktur, tidak mudah untuk dikondisikan. Adagium “kembali ke Khittah NU 1926” menjadi semacam filter bagi warga NU untuk berpolitik praktis. Namun demikian, jika dilihat dari hasil Pemilu Legislatif untuk tingkat DPRD Kota Makassar, khususnya pada tahun 2014 dan 2019, suara warga NU tidak hanya terkonsentrasi pada salah satu tokoh yang berafiliasi ke NU, namun juga tersebar ke sejumlah tokoh yang tidak berafiliasi ke NU. Hal ini ditengarai sebagai imbas dari kurang solidnya para tokoh dan elit politik yang berafiliasi ke NU mengonsolidasikan selu-

ruh kekuatan, termasuk kekuatan politik yang terdapat di NU, sehingga perolehan jumlah kursi yang dimiliki oleh para elit dan tokoh yang berafiliasi ke NU dari dua edisi pemilu legislatif ini menjadi bervariasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Bungin, B. (2007). *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik Dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Edwinarta, C. D., & Dwijayanti, R. (2016). Komunikasi Politik Elite NU Dan Muhammadiyah Dalam Pilkada Kediri. *Jurnal Kajian Media, Vol. 2, No. 1*, 20-29.
- Fadli. (2019, Oktober 15). Kelurahan Maccini Parang, Kota Makassar. (Wahyuni, Interviewer)
- Faizin, N. (2017). Nahdlatul Ulama (NU) dalam Dinamika Politik Lokal: Studi Kasus Pada Pemilukada di Kabupaten Sumenep Tahun 2010. *Jurnal Sosiologi Reflektif, Vol. 11, No. 2*, 51-82.
- Feillard, A. (1999). *NU Vis-à-Vis Negara*. Yogyakarta : LKiS.
- Gatara, A. S., & Said, M. D. (2007). *Sosiologi Politik: Konsep dan Dinamika Perkembangan Kajian*. Bandung: Pustaka Setia.
- Muhammad, F. (2015). Dinamika Pemikiran Dan Gerakan Politik. *Kalam:*

- Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*, Vol. 9, No. 1, 57-76.
- Murcitaningrum, S. (2013). *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*. Bandar Lampung: Ta'lim Press.
- Nahdlatul Ulama. (2010). *Dinamika Ideologi Dan Politik Kenegaraan*. Jakarta: Kompas.
- Nahdlatul Ulama. (2021). *Materi Munas Alim Ulama dan Konbes NU: Islam Nusantara dan Kemandirian NU untuk Peradaban Dunia*. Jakarta: Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama.
- Noer, D. (1996). *Gerakan Modern Islam Di Indonesia 1900-1942*. Jakarta: LP3ES.
- Sadi, H. (2016). Kiai Dan Politik: Mengintip Motif Kiai Nu (Nahdlatul Ulama) dalam Pemilu 2009 di Glenmore Kabupaten Banyuwangi. *Khazanah Pendidikan: Jurnal Ilmiah Kependidikan*, Vol. X, No. 1, 1-21.
- Salim, H., & Ridwan, M. (1999). *Kultur Hibrida: Anak Muda NU Di Jalur Kultural*. Yogyakarta: LKiS.
- Saprillah. (2020). *Dinamika NU*. Makassar: Lakpesdam PWNu Sulawesi Selatan.
- Syahbani, S., Rusdiyanto, & Wihardi, D. (2013). *Pengetahuan Dasar Ilmu Politik*. Bogor: Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Wirawan, I. (2012). *Teori-Teori Sosial Dalam Tiga Paradigma: Fakta Sosial, Definisi Sosial, dan Perilaku Sosial*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Zainal, A. A., Zainal, N. A., & Syam, F. (2019). Polarisasi Dukungan Politik Muslimat Dan Fatayat Nahdlatul Ulama Pada Pilkada Serentak Tahun 2015 di Kabupaten Luwu Utara. *Vox Populi*, Vol. 2, No. 1, 12-27.

Website

- Suyuti, M. (2016, April 4). *NU Online*. Retrieved from NU Online: <https://www.nu.or.id/fragmen/dari-ulama-kharismatik-ini-seperdua-penduduk-sulsel-berdarah-nu-h54Tq>

Wawancara

- Arfah, A. (2015, Januari 12). Tokoh Pemuda NU.
- Saprillah. (2015, Januari 7). Peneliti di Balitbang Agama Kota Makassar.
- Sartono, K. (2022, Mei 19). Ketua Tanfidziah PCNU kota Makassar Periode 2019-2024.
- Sofyan, U. (2022, Maret 13). Sekretaris PCNU Kota Makassar.